

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

jdih.bpk.go.id
DITAMA BINBANGKUM
2022

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :	Menimbang :	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 ayat (5), Pasal 37, dan Pasal 43 Undang-undang	bahwa sehubungan dengan adanya kepentingan nasional untuk mempercepat peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi nasional, perlu mengubah Peraturan	a. bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 002/PUU-I/2003 tentang Permohonan Uji Formil dan Materiil terhadap Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 22 ayat

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009</p>
<p>Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</p>	<p>Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</p>	<p>(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka penataan kembali kewajiban Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi dalam negeri, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.	Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI..	Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.
	PASAL I	PASAL I

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
	Di antara Pasal 103 Bab XII Ketentuan Lain dan Pasal 104 Bab XIII Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 103A, Pasal 103B, Pasal 103C, dan Pasal 103D, yang berbunyi sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530), diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM		1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1		Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kuasa Pertambangan, Survei Umum, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana, Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam	Tetap	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kuasa Pertambangan, Survei Umum, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gas Metana Batubara (<i>Coalbed Methane</i>) adalah gas bumi (hidrokarbon) dimana gas metana merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam proses pembentukan batubara (<i>coalification</i>) dalam kondisi terperangkap dan terserap (terabsorpsi) di dalam batubara dan/atau lapisan batubara. 3. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja. 4. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. 5. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan. 6. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk 		<p>Pelaksana, Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gas Metana Batubara (<i>Coalbed Methane</i>) adalah gas bumi (hidrokarbon) dimana gas metana merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam proses pembentukan batubara (<i>coalification</i>) dalam kondisi terperangkap dan terserap (terabsorpsi) di dalam batubara dan/atau lapisan batubara. 3. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja. 4. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. 5. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan. 6. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009</p>
<p>melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.</p> <p>7. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (<i>digital</i>), gambar (<i>analog</i>), media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>8. Departemen adalah departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>9. Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara <i>juncto</i> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>10. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan</p>		<p>Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.</p> <p>7. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (<i>digital</i>), gambar (<i>analog</i>), media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>8. Departemen adalah departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>9. Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara <i>juncto</i> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>10. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).		Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
BAB II WILAYAH KERJA		
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
(1) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja. (2) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana.	Tetap	Tetap
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
(1) Menteri menetapkan dan mengumumkan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap. (2) Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.		
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
(1) Menteri menetapkan kebijakan penawaran Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan. (2) Kebijakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penawaran melalui lelang atau penawaran langsung.	Tetap	Tetap
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
(1) Penawaran Wilayah Kerja kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana. (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>(4) Dalam hal PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja terbuka tertentu, Menteri dapat menyetujui permohonan tersebut dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina (Persero) dan sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara.</p> <p>(5) PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat mengajukan permohonan untuk Wilayah Kerja yang telah ditawarkan.</p>		
		2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai Kontraktor yang diberi wewenang melakukan Kegiatan Usaha Hulu pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan</p>	Tetap	<p>(1) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai Kontraktor untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja tertentu.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Badan Pelaksana. (3) Untuk setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diberikan satu Wilayah Kerja.		dengan Badan Pelaksana. (3) (3) Untuk setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diberikan satu Wilayah Kerja.
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
(1) Kontraktor wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana, sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. (2) Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kontraktor dapat mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana sebelum jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir. (3) Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri melalui Badan Pelaksana, setelah jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir.	Tetap	Tetap
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
Dalam hal Kontraktor mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terlebih dahulu wajib memenuhi seluruh komitmen pasti Eksplorasi dan kewajiban lain berdasarkan Kontrak	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Kerja Sama.		
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi Wilayah Terbuka.	Tetap	Tetap
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
Terhadap bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor, Menteri dapat meminta bagian Wilayah Kerja tersebut dan menetapkan kebijakan pengusahaannya berdasarkan pertimbangan optimasi pemanfaatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pelaksana.	Tetap	Tetap
BAB III SURVEI UMUM DAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI	Tetap	Tetap
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja, Menteri melakukan kegiatan Survei Umum. (2) Kegiatan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Wilayah Terbuka di dalam Wilayah Hukum Pertambangan.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
(3) Kegiatan Survei Umum antara lain meliputi Survei geologi, Survei geofisika, dan Survei geokimia.		
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
Selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2), Survei Umum dapat dilaksanakan melintasi Wilayah Kerja setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana untuk pemberitahuan kepada Kontraktor yang bersangkutan.	Tetap	Tetap
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
<p>(1) Dalam rangka pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri dapat memberikan izin kepada Badan Usaha sebagai pelaksana Survei Umum.</p> <p>(2) Pelaksanaan Survei Umum oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan atas biaya dan risiko sendiri.</p> <p>(3) Sebelum melaksanakan Survei Umum Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada Menteri jadwal dan prosedur pelaksanaan Survei Umum.</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
Badan Usaha yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat menyimpan dan memanfaatkan Data hasil Survei Umum sampai dengan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).	Tetap	Tetap
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah. (2) Menteri menetapkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	Tetap	Tetap
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan Data .	Tetap	Tetap
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
(1) Pengiriman, penyerahan dan atau pemindahtanganan	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib mendapatkan izin dari Menteri.</p> <p>(2) Menteri menetapkan jenis-jenis Data yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>		
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
<p>(1) Kontraktor dapat mengelola Data hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama, kecuali pemusnahan Data.</p> <p>(2) Apabila Kontraktor dalam pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk pihak lain, wajib mendapatkan persetujuan Menteri.</p> <p>(3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mengelola Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Kontraktor wajib menyimpan Data yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia. (5) Kontraktor dapat menyimpan salinan Data di luar</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, setelah mendapatkan izin Menteri.		
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Badan Usaha yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada Menteri setelah berakhirnya izin yang diberikan.</p> <p>(2) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kontraktor wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.</p> <p>(3) Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib menyerahkan kepada Menteri seluruh Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya apabila Wilayah Kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p> <p>(4) Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah berakhir atau yang mengalihkan semua interesnya kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain, dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk menyimpan dan menggunakan salinan data</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
dari Wilayah Kerjanya. (5) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa izin Menteri		
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib menyerahkan Data hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya perolehan, pengolahan dan interpretasi Data.	Tetap	Tetap
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
Pertukaran Data antar Kontraktor di dalam negeri atau antar Kontraktor dalam negeri dengan pihak lain di luar negeri dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Menteri.	Tetap	Tetap
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
Dalam hal kerahasiaannya, Data diklasifikasikan sebagai berikut : a. Data Umum; merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksi Minyak dan Gas Bumi.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>b. Data Dasar; merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi.</p> <p>c. Data Olahan; merupakan Data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi Data Dasar.</p> <p>d. Data Interpretasi; merupakan Data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan.</p>		
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
<p>(1) Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>(2) Masa kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:</p> <p>a. Data Dasar, ditetapkan 4 (empat) tahun.</p> <p>b. Data Olahan, ditetapkan 6 (enam) tahun.</p> <p>c. Data Interpretasi, ditetapkan 8 (delapan) tahun.</p>	Tetap	Tetap
<p>BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU</p>	Tetap	Tetap
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>(1) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.</p> <p>(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:</p> <p>a. kepemilikan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;</p> <p>b. kepemilikan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;</p> <p>c. modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
<p>(1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan untuk Wilayah Kerja tertentu dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Pelaksana.		
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
<p>Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerimaan Negara; b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya; c. kewajiban pengeluaran dana; d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; f. penyelesaian perselisihan; g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; h. berakhirnya kontrak; i. kewajiban pasca operasi pertambangan; j. keselamatan dan kesehatan kerja; k. pengelolaan lingkungan hidup; l. pengalihan hak dan kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; 	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<ul style="list-style-type: none"> o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. 		
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27
<ul style="list-style-type: none"> (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lama 30 (tiga puluh) tahun. (2) Jangka Waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi. (3) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan permintaan dari Kontraktor selama Kontraktor telah memenuhi kewajiban minimum menurut Kontrak Kerja Sama yang persetujuannya dilakukan oleh Badan Pelaksana. (4) Apabila dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kontraktor 	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
tidak menemukan cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial maka Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.		
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat diperpanjang dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan. (2) Ketentuan-ketentuan atau bentuk Kontrak Kerja Sama dalam perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus tetap	Tetap	Tetap

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009</p>
<p>menguntungkan bagi Negara.</p> <p>(3) Kontraktor melalui Badan Pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.</p> <p>(4) Badan Pelaksana melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Kontraktor.</p> <p>(5) Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.</p> <p>(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (5), dalam hal Kontraktor telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi, Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama lebih cepat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).</p> <p>(7) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan</p>		

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009</p>
<p>Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mempertimbangkan faktor-faktor antara lain potensi cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi atau kepastian pasar/kebutuhan, dan kelayakan teknis/ekonomis.</p> <p>(8) Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (7) Menteri dapat menolak atau menyetujui permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu, bentuk dan ketentuan Kontrak Kerja Sama tertentu.</p> <p>(9) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk Wilayah Kerja yang habis jangka waktu Kontraknya.</p> <p>(10) Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina (Persero) sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara dan hal-</p>		

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
hal lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.		
Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29
(1) Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri perubahan (amandemen) ketentuan dan persyaratan Kontrak Kerja Sama. (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana dan manfaat yang optimal bagi negara.	Tetap	Tetap
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
(1) Dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib memulai kegiatannya. (2) Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan mengenai pengakhiran Kontrak Kerja Sama.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Pasal 31	Pasal 31	Pasal 31
<p>(1) Selama 3 (tiga) tahun pertama pada jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), kontraktor wajib melakukan program kerja pasti dengan perkiraan jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.</p> <p>(2) Apabila dalam pelaksanaan program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis dan ekonomis tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan perubahan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>(3) Menteri dapat menyetujui atau menolak usul program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.</p> <p>(4) Dalam hal Kontraktor mengakhiri Kontrak Kerja Sama dan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kontraktor wajib membayar kepada Pemerintah melalui Badan Pelaksana senilai jumlah pengeluaran yang terkait dengan program kerja pasti</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
yang belum dapat dilaksanakan.		
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontra Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama.	Tetap	Tetap
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
(1) Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (<i>participating interest</i>) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. (2) Dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan nasional.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>(3) Pembukaan (<i>disclose</i>) Data dalam rangka pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri melalui Badan Pelaksana.</p> <p>(4) Kontraktor tidak dapat mengalihkan sebagian hak dan kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi..</p>		
Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan <i>participating interest</i> 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35
(1) Pernyataan minat dan kesanggupan untuk mengambil <i>participating interest</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>dari Kontraktor.</p> <p>(2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah tidak memberikan pernyataan kesanggupan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kontraktor wajib menawarkan kepada perusahaan nasional.</p> <p>(3) Dalam hal perusahaan nasional tidak memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari Kontraktor kepada perusahaan nasional, maka penawaran dinyatakan tertutup.</p>		
Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36
<p>(1) Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran.</p> <p>(3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan. (4) Tata cara penggunaan dana cadangan khusus untuk pasca operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.		
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
(1) Kontrak Kerja Sama dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris. (2) Apabila Kontrak Kerja Sama dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang dipergunakan adalah penafsiran dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai kesepakatan para pihak.	Tetap	Tetap
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
Terhadap Kontrak Kerja Sama tunduk dan berlaku hukum Indonesia.	Tetap	Tetap
Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39
(1) Kontraktor wajib melaporkan penemuan dan hasil sertifikasi cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi kepada Menteri melalui Badan Pelaksana. (2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi Kontraktor wajib melakukan	Tetap	Tetap

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009</p>
<p>konservasi dan melaksanakannya sesuai dengan Kaidah Keteknikan yang baik.</p> <p>(3) Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui upaya optimasi eksploitasi dan efisiensi pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(4) Kaidah Keteknikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; b. memproduksi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kaidah pengelolaan reservoir (Reservoir Management) yang baik; c. memproduksi sumur Minyak dan Gas Bumi dengan cara yang tepat; d. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut (EOR) yang tepat; e. meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoir untuk mengalirkan fluida dengan teknik yang tepat; f. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan. 		
<p align="center">Pasal 40</p>	<p align="center">Pasal 40</p>	<p align="center">Pasal 40</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib melaporkan kepada Menteri apabila diketemukan dan memperoleh bukti adanya pelamparan reservoir Minyak dan/atau Gas Bumi yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya, Wilayah Terbuka atau wilayah/landas kontinen negara lain.	Tetap	Tetap
Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41
<p>(1) Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila terbukti adanya pelamparan reservoir yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya.</p> <p>(2) Untuk pelamparan reservoir yang memasuki Wilayah Terbuka, Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila Wilayah Terbuka tersebut kemudian menjadi Wilayah Kerja.</p> <p>(3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Wilayah Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum menjadi Wilayah Kerja, maka Kontraktor yang bersangkutan melalui Badan Pelaksana dapat meminta perluasan Wilayah Kerjanya secara proporsional.</p> <p>(4) Unitisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Menteri.		
Pasal 42	Pasal 42	Pasal 42
Menteri menentukan operator pelaksana unitisasi berdasarkan kesepakatan diantara para Kontraktor yang melakukan unitisasi dan pertimbangan Badan Pelaksana.	Tetap	Tetap
Pasal 43	Pasal 43	Pasal 43
Untuk pelamparan reservoir yang memasuki wilayah/landas kontinen negara lain penyelesaiannya akan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan perjanjian landas kontinen antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lainnya yang terkait serta pertimbangan manfaat yang optimal bagi negara.	Tetap	Tetap
Pasal 44	Pasal 44	Pasal 44
(1) Kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri yang dilakukan Kontraktor yang bersangkutan merupakan Kegiatan Usaha Hulu. (2) Dalam hal terdapat kapasitas berlebih pada fasilitas pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Badan Pelaksana,	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Kontraktor dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas tersebut untuk digunakan pihak lain berdasarkan prinsip pembebanan biaya operasi (<i>cost sharing</i>) secara proporsional.		
Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45
(1) Fasilitas yang dibangun Kontraktor untuk melaksanakan kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. (2) Dalam hal fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba, Kontraktor wajib membentuk Badan Usaha Kegiatan Usaha Hilir yang terpisah dan wajib mendapatkan Izin Usaha.	Tetap	Tetap
BAB V PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI	Tetap	3. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46
<p>(1) Kontraktor bertanggungjawab untuk ikut serta memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri.</p> <p>(2) Bagian Kontraktor dalam memenuhi keperluan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan sistem prorata hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.</p> <p>(3) Besaran kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.</p> <p>(4) Menteri menetapkan besaran kewajiban setiap Kontaktor dalam memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).</p>	Tetap	<p>(1) Kontraktor wajib ikut memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Kewajiban Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Kontraktor.</p> <p>(4) Dihapus.</p>
Pasal 47	Pasal 47	Pasal 47
Menteri menetapkan kebijakan mengenai pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri setiap tahun sekali.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
		4. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48
<p>(1) Terhadap cadangan Gas Bumi yang baru ditemukan Kontraktor wajib menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Menteri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.</p> <p>(2) Dalam hal cadangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diproduksi, Menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kepada konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya batas waktu 1 (satu) tahun pemberian kesempatan kepada konsumen di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),</p>	Tetap	<p>(1) Terhadap cadangan Gas Bumi yang baru ditemukan, Kontraktor wajib menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Menteri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.</p> <p>(2) Dalam hal cadangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproduksi, Menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada konsumen di dalam negeri untuk menyampaikan kebutuhan Gas Buminya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak cadangan Gas Bumi yang baru ditemukan.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya batas waktu 1 (satu) tahun pemberian kesempatan kepada konsumen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor mengenai kondisi kebutuhan di dalam negeri.		(2), Menteri harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor mengenai kondisi kebutuhan di dalam negeri. (4) Dalam hal Menteri menyampaikan adanya kebutuhan Gas Bumi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kontraktor wajib mulai melakukan negosiasi dengan konsumen dalam negeri dengan memperhatikan keekonomian pengembangan lapangan Gas Bumi. (5) Dalam hal Menteri menyampaikan tidak adanya kebutuhan Gas Bumi dalam negeri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau antara Kontraktor dan konsumen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka Kontraktor dapat menjual Gas Bumi kepada pasar internasional setelah mendapat persetujuan Menteri.
Pasal 49	Pasal 49	Pasal 49
Mekanisme pelaksanaan penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Kontrak Kerja Sama.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Pasal 50	Pasal 50	Pasal 50
<p>(1) Menteri menetapkan kebijakan pemanfaatan Gas Bumi dari cadangan Gas Bumi dengan mengupayakan agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi secara optimal dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan negara, dan kebijakan energi nasional.</p> <p>(2) Dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mempertimbangkan aspek teknis yang meliputi cadangan dan peluang pasar Gas Bumi, infrastruktur baik yang tersedia maupun yang direncanakan dan usulan dari Badan Pelaksana.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 51	Pasal 51	Pasal 51
<p>(1) Terhadap Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditemukan, diproduksi dan dijual wajib dilakukan evaluasi mutu.</p> <p>(2) Biaya yang timbul dalam melakukan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan sebagai biaya operasi.</p> <p>(3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi mutu Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.		
BAB VI PENERIMAAN NEGARA	Tetap	Tetap
Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52
(1) Kontraktor yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan Negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Penerimaan Negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. pajak-pajak; b. bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai; c. pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. bagian Negara; b. pungutan Negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi; c. bonus-bonus.	Tetap	Tetap
Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53
Sebelum Kontrak Kerja Sama ditandatangani,	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>Kontraktor dapat memilih ketentuan kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dengan pilihan sebagai berikut:</p> <p>a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau</p> <p>b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p>		
Pasal 54	Pasal 54	Pasal 54
<p>Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus-bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) serta tata cara penyetorannya diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55
<p>(1) Pembagian hasil Minyak dan Gas Bumi pada Kontrak Bagi Hasil antara Pemerintah dan Kontraktor dilakukan pada titik penyerahan.</p> <p>(2) Dalam penyerahan Minyak dan Gas Bumi pada titik penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib digunakan sistem alat ukur yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 56	Pasal 56	Pasal 56
(1) Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana. (2) Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (<i>Authorization Financial Expenditure</i>) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.	Tetap	Tetap
Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57
Seluruh produksi Minyak dan Gas Bumi yang dihasilkan Kontraktor pada Kontrak Jasa merupakan milik Negara dan wajib diserahkan Kontraktor kepada Pemerintah.	Tetap	Tetap
Pasal 58	Pasal 58	Pasal 58
(1) Kepada Kontraktor yang melakukan Eksploitasi Minyak dan/atau Gas Bumi berdasarkan Kontrak	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>Jasa diberikan imbalan jasa (<i>fee</i>).</p> <p>(2) Besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah produksi Minyak dan/atau Gas Bumi yang dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan penawaran dari Badan Usaha/Badan Usaha Tetap.</p> <p>(3) Kontraktor yang melakukan Eksploitasi Minyak dan/atau gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menanggung seluruh biaya dan resiko dalam memproduksi Minyak dan/atau Gas Bumi.</p> <p>(4) Imbalan jasa (<i>fee</i>) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah produksi komersial.</p>		
Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59
Ketentuan mengenai Kontrak Jasa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.	Tetap	Tetap
Pasal 60	Pasal 60	Pasal 60
Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Pasal 61	Pasal 61	Pasal 61
Penerimaan Negara bukan pajak setelah dikurangi penerimaan Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Negara bukan pajak dari sektor Minyak dan Gas Bumi yang dapat dimanfaatkan sebagian oleh Departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap	Tetap
BAB VII TATA CARA PENYELESAIAN PENGUNAAN TANAH HAK ATAU TANAH NEGARA	Tetap	Tetap
Pasal 62	Pasal 62	Pasal 62
(1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara.		
Pasal 63	Pasal 63	Pasal 63
<p>(1) Penyelesaian penggunaan tanah oleh Kontraktor, dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara langsung dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara yang bersangkutan dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain.</p> <p>(3) Dalam hal tanah yang bersangkutan adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat, tata cara</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
musyawarah dan mufakat harus memperhatikan tata cara pengambilan keputusan masyarakat hukum adat setempat.		
Pasal 64	Pasal 64	Pasal 64
(1) Dalam hal jumlah masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara cukup banyak, sehingga tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah tersebut dapat dilaksanakan secara parsial atau dengan wakil yang ditunjuk oleh dan yang bertindak selaku kuasa pemegang hak, dengan surat kuasa yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) para pihak dapat menunjuk pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap	Tetap
Pasal 65	Pasal 65	Pasal 65
(1) Penetapan ganti kerugian terhadap tanah berpedoman pada hasil musyawarah, dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak terakhir.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
(2) Penetapan ganti kerugian terhadap bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang berada di atas tanah, berpedoman pada standar teknis terkait.		
Pasal 66	Pasal 66	Pasal 66
(1) Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (2) Pada saat pembuatan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang hak atas tanah menyerahkan sertifikat dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan kepada Kontraktor.	Tetap	Tetap
Pasal 67	Pasal 67	Pasal 67
(1) Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa. (2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimohon sertifikat hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68
<p>(1) Wilayah Kerja Kontraktor yang belum digunakan untuk Eksplorasi dan Eksploitasi, dapat digunakan untuk kegiatan selain Eksplorasi dan Eksploitasi oleh pihak lain setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri dan izin penggunaan dari Pemerintah Daerah setempat.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan rekomendasi Menteri dapat memohon hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69
<p>(1) Kontraktor dapat melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi selain kegiatan sebagaimana dalam Pasal 44 di dalam Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.</p> <p>(2) Kontraktor dapat membangun fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 di atas bidang tanah di dalam dan/atau di luar Wilayah Kerja Kontraktor setelah dilakukan pengadaannya sesuai ketentuan dalam Bab ini.</p> <p>(3) Kepemilikan, pendaftaran hak atas tanah dan</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
pembukuan atas bidang tanah yang digunakan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku ketentuan Pasal 68.		
Pasal 70	Pasal 70	Pasal 70
<p>(1) Kontraktor yang memiliki <i>Right of Way</i> (ROW) pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi diwajibkan mengizinkan Kontraktor lainnya menggunakan ROW tersebut untuk pembangunan dan penggunaan pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis serta keselamatan dan keamanan.</p> <p>(3) Kontraktor yang akan menggunakan ROW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan perundingan secara langsung dengan Kontraktor/pihak lain pemilik ROW. (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dicapai kesepakatan, Kontraktor mengajukan kepada Menteri melalui Badan Pelaksana untuk menetapkan penyelesaian lebih lanjut.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Tanah yang digunakan untuk <i>Right of Way</i> (ROW) pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap	Tetap
BAB VIII KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT	Tetap	Tetap
Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72
Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.	Tetap	Tetap
Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73
Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Pasal 74	Pasal 74	Pasal 74
(1) Kontraktor dalam melaksanakan kegiatannya ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. (2) Tanggung jawab Kontraktor dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara Kontraktor dengan masyarakat di sekitarnya.	Tetap	Tetap
Pasal 75	Pasal 75	Pasal 75
Dalam keikutsertaan untuk pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Kontraktor mengalokasikan dana dalam setiap penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Tetap	Tetap
Pasal 76	Pasal 76	Pasal 76

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
(1) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh Kontraktor dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. (2) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk masyarakat di sekitar daerah dimana Eksploitasi dilaksanakan.	Tetap	Tetap
Pasal 77	Pasal 77	Pasal 77
Pelaksanaan keikutsertaan Kontraktor dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diberikan dalam bentuk natura berupa sarana dan prasarana fisik, atau pemberdayaan usaha dan tenaga kerja setempat.	Tetap	Tetap
BAB IX PEMANFAATAN BARANG, JASA, TEKNOLOGI DAN KEMAMPUAN REKAYASA DAN RANCANG BANGUN DALAM NEGERI	Tetap	Tetap
Pasal 78	Pasal 78	Pasal 78
(1) Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana.</p> <p>(2) Dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari luar negeri, tata cara impor barang dan peralatan tersebut ditetapkan bersama oleh Menteri, Menteri Keuangan dan menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan perdagangan.</p> <p>(3) Barang dan peralatan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Kontraktor dapat menggunakan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama berlakunya Kontrak Kerja Sama.</p>		
Pasal 79	Pasal 79	Pasal 79
<p>(1) Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.</p> <p>(2) Pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun tersebut telah dihasilkan atau tersedia dalam negeri serta memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.		
Pasal 80	Pasal 80	Pasal 80
Barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat diimpor selama belum diproduksi di dalam negeri dan selama barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang akan diimpor memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.	Tetap	Tetap
Pasal 81	Pasal 81	Pasal 81
(1) Pengelolaan barang dan peralatan yang dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu dilakukan oleh Badan Pelaksana. (2) Kelebihan persediaan barang dan peralatan	Tetap	Tetap

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009</p>
<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dialihkan penggunaannya kepada Kontraktor lain di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia atas persetujuan Badan Pelaksana dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri dan Menteri Keuangan.</p> <p>(3) Dalam hal kelebihan persediaan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak digunakan oleh Kontraktor lain, Badan Pelaksana wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk ditetapkan kebijakan pemanfaatannya.</p> <p>(4) Dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dihibahkan, dijual, dipertukarkan, dijadikan penyertaan modal negara, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara dipinjamkan, disewakan dan kerjasama pemanfaatan, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Badan Pelaksana melalui Menteri.</p> <p>(5) Dalam hal Kontrak Kerja Sama telah berakhir, barang dan peralatan Kontraktor wajib diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan kebijakan</p>		

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
BAB X KETENAGAKERJAAN	Tetap	Tetap
Pasal 82	Pasal 82	Pasal 82
<p>(1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.</p> <p>(2) Kontraktor dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.</p> <p>(3) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 83	Pasal 83	Pasal 83

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Ketentuan mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja serta penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	Tetap	Tetap
Pasal 84	Pasal 84	Pasal 84
Untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja Indonesia agar dapat memenuhi standar kompetensi kerja dan kualifikasi jabatan Kontraktor wajib melaksanakan pembinaan dan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.	Tetap	Tetap
Pasal 85	Pasal 85	Pasal 85
Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap	Tetap
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU	Tetap	Tetap
Pasal 86	Pasal 86	Pasal 86
(1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha hulu dilakukan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri.	Tetap	Tetap

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009</p>
<p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :</p> <p>a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu, dan;</p> <p>b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha hulu berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan.</p> <p>(3) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha hulu terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada Menteri.</p> <p>(4) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.</p> <p>(5) Badan Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja</p>		

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).</p> <p>(6) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Badan Pelaksana berwenang menandatangani kontrak lain yang terkait dengan Kontrak Kerja Sama.</p> <p>(7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan oleh Badan Pelaksana melalui pengendalian manajemen atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.</p>		
Pasal 87	Pasal 87	Pasal 87
<p>(1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. perizinan, persetujuan, dan rekomendasi;</p> <p>c. pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi; d. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>d. penelitian dan pengembangan teknologi;</p> <p>e. penerapan standardisasi;</p> <p>f. pemberian akreditasi;</p> <p>g. pemberian sertifikasi;</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>h. pembinaan industri/badan usaha penunjang; i. pembinaan usaha kecil/menengah; j. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; k. pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja; l. pelestarian lingkungan hidup; m. penciptaan iklim investasi yang kondusif; n. pemeliharaan keamanan dan ketertiban.</p> <p>(2) Penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, meliputi pengaturan mengenai:</p> <p>a. pelaksanaan Survei Umum; b. pengelolaan dan pemanfaatan data Minyak dan Gas Bumi; c. penyiapan, penetapan dan penawaran serta pengembalian Wilayah Kerja; d. bentuk dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama; e. perpanjangan Kontrak Kerja Sama; f. rencana pengembangan lapangan yang pertama kali; g. pengembangan lapangan dan pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi; h. pemanfaatan Gas Bumi;</p>		

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<ul style="list-style-type: none"> i. penerapan kaidah keteknikan yang baik; j. kewajiban penyerahan bagian Minyak dan Gas Bumi Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO); k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi; l. kewajiban membayar penerimaan negara; m. pengelolaan lingkungan hidup; n. keselamatan dan kesehatan kerja; o. penggunaan Tenaga Kerja Asing; p. pengembangan Tenaga Kerja Indonesia; q. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; r. standardisasi; s. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; t. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi; u. Pengusahaan <i>coalbed methane</i>; v. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut 		

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
kepentingan umum.		
Pasal 88	Pasal 88	Pasal 88
<p>Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi; b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi; c. kaidah keteknikan yang baik; d. keselamatan dan kesehatan kerja; e. pengelolaan lingkungan hidup; f. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; g. penggunaan tenaga kerja asing; h. pengembangan tenaga kerja Indonesia; i. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; j. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi; k. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum. 	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Pasal 89	Pasal 89	Pasal 89
(1) Tanggung jawab pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berada pada Departemen dan departemen terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berada pada Departemen dan departemen terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing	Tetap	Tetap
Pasal 90	Pasal 90	Pasal 90
Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), Badan Pelaksana mempunyai tugas : a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;</p> <p>e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;</p> <p>f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;</p> <p>g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.</p>		
Pasal 91	Pasal 91	Pasal 91
Badan Pelaksana melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama.	Tetap	Tetap
Pasal 92	Pasal 92	Pasal 92
Dalam melakukan pengawasan atas ditaatinya pelaksanaan ketentuanketentuan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Badan Pelaksana mengkoordinasikan Kontraktor untuk melakukan hubungan dengan Departemen dan departemen terkait.	Tetap	Tetap
Pasal 93	Pasal 93	Pasal 93

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>(1) Kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Menteri mengenai hal-hal yang terkait dengan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.</p> <p>(2) Kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Badan Pelaksana mengenai hal-hal yang terkait dengan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 94	Pasal 94	Pasal 94
<p>(1) Dalam melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, Badan Pelaksana bertindak sebagai pihak yang berkontrak dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.</p> <p>(2) Penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri atas nama Pemerintah.</p> <p>(3) Badan Pelaksana memberitahukan secara tertulis Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
Indonesia dengan melampirkan salinannya.		
Pasal 95	Pasal 95	Pasal 95
<p>(1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana.</p> <p>(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan konsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan.</p> <p>(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari Minyak dan Gas Bumi.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 96	Pasal 96	Pasal 96
(1) Dalam hal Kontraktor telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>ayat (1) tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan lapangan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama, Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pengembangan lapangan Gas Bumi, apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum terdapat perikatan jual beli Gas Bumi, Menteri dapat menetapkan kebijakan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Kontraktor yang bersangkutan.</p>		
Pasal 97	Pasal 97	Pasal 97
<p>Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, Badan Pelaksana harus mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perkiraan cadangan dan produksi Minyak dan Gas Bumi;</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<ul style="list-style-type: none"> b. perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengembangan lapangan dan biaya produksi Minyak dan Gas Bumi; c. rencana pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi; d. proses eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; e. perkiraan penerimaan Negara dari Minyak dan Gas Bumi; f. penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri; g. keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat. 		
Pasal 98	Pasal 98	Pasal 98
<p>Dalam memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, Badan Pelaksana harus mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana jangka panjang; b. keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan; c. upaya peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi; d. teknis kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan yang akan dilakukan; 	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<ul style="list-style-type: none"> e. upaya efisiensi; f. rencana pengembangan lapangan yang sudah disetujui; g. tata waktu kegiatan dan berakhirnya Kontrak Kerja Sama; h. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; i. penggunaan dan pengembangan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial; j. pengembangan lingkungan masyarakat setempat. 		
Pasal 99	Pasal 99	Pasal 99
<p>Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara periodik hal-hal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana kerja dan anggaran setiap Kontraktor serta realisasinya; b. perkiraan dan realisasi produksi Minyak dan Gas Bumi; c. perkiraan dan realisasi penerimaan Negara; d. perkiraan dan realisasi biaya investasi pada Eksplorasi dan Eksploitasi; 	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
e. realisasi biaya operasi setiap Kontraktor; f. pengelolaan atas penggunaan aset dan barang operasi oleh Kontraktor.		
Pasal 100	Pasal 100	Pasal 100
<p>(1) Dalam pelaksanaan penunjukan penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g, Badan Pelaksana dapat menunjuk Badan Usaha atau Kontraktor yang bersangkutan.</p> <p>(2) Badan Usaha atau Kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara diberi wewenang untuk memindahkan hak kepemilikan atas Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara kepada pembeli pada titik penyerahan berdasarkan perjanjian jual dan beli Minyak dan/atau Gas Bumi yang terkait.</p> <p>(3) Badan Pelaksana dapat menunjuk Kontraktor untuk menjualkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang berasal dari Wilayah Kerjanya berdasarkan Kontrak Kerja Sama.</p> <p>(4) Badan Pelaksana dapat menunjuk Kontraktor untuk menjualkan Gas Bumi bagian Negara yang berasal</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>dari Wilayah Kerjanya berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan dari Wilayah Kerja lainnya.</p> <p>(5) Sebelum menunjuk Badan Usaha sebagai penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana berkonsultasi dengan Kontraktor dan wajib memperhatikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelancaran dan keberlanjutan serta efisiensi penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi; b. kemampuan penjual; c. harga jual Minyak dan/atau Gas Bumi; d. hak dan kewajiban penjual; e. Tidak terdapat benturan kepentingan antara Badan Usaha yang ditunjuk sebagai penjual dengan Kontraktor. <p>(6) Penunjukan Badan Usaha atau Kontraktor sebagai penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta persyaratannya dituangkan dalam bentuk perjanjian.</p> <p>(7) Dalam hal yang ditunjuk sebagai penjual adalah Kontraktor yang bersangkutan maka biaya yang</p>		

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>timbul dari penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi akan diberlakukan sebagai biaya operasi sebagaimana diatur dalam Kontrak kerja Sama dengan Kontraktor yang bersangkutan, kecuali apabila biaya atau akibat tersebut disebabkan kesalahan yang disengaja oleh Kontraktor yang bersangkutan.</p> <p>(8) Dalam hal yang ditunjuk sebagai penjual bukan Kontraktor yang bersangkutan, imbalan yang diberikan kepada penjual dibebankan pada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi.</p> <p>(9) Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai realisasi penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan perjanjian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p>		
Pasal 101	Pasal 101	Pasal 101
(1) Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) bertanggung jawab sepenuhnya kepada pembeli untuk kelancaran dan keberlanjutan	Tetap	Tetap

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009</p>
<p>penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi.</p> <p>(2) Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemasaran, negosiasi dengan calon pembeli dan menandatangani perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya yang terkait.</p> <p>(3) Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemasaran, negosiasi dengan calon pembeli dan menandatangani perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya yang terkait.</p> <p>(4) Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh penjual selain Kontraktor dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kontraktor yang bersangkutan.</p> <p>(5) Badan Pelaksana melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.</p>		
<p align="center">Pasal 102</p>	<p align="center">Pasal 102</p>	<p align="center">Pasal 102</p>
<p>(1) Menteri dapat mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai ruang lingkup pelaksanaan pengawasan</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>Kegiatan Usaha Hulu oleh Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.</p> <p>(2) Kepala Badan Pelaksana dapat mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai ruang lingkup pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.</p> <p>(3) Dalam hal diperlukan Menteri dan Kepala Badan Pelaksana dapat mengatur secara bersama mengenai ruang lingkup pengawasan Kegiatan Usaha Hulu.</p>		
<p>BAB XII KETENTUAN LAIN</p>	<p>Di antara Pasal 103 Bab XII Ketentuan Lain dan Pasal 104 Bab XIII Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 103A, Pasal 103B, Pasal 103C, dan Pasal 103D, yang berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 103</p>	<p>Pasal 103</p>	<p>Pasal 103</p>
<p>Ketentuan mengenai pengusahaan Gas Metana Batubara termasuk bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Samanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
	Pasal 103A	Pasal 103A
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	<p>(1) Dalam hal adanya kepentingan nasional yang mendesak, dengan tetap mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara, dapat dilakukan pengecualian terhadap beberapa ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penawaran <i>participating interest</i> kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; b. pengembalian biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; c. jangka waktu Kontrak Kerja Sama pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf h; d. besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf k. <p>(2) Kepentingan nasional yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mempercepat peningkatan produksi</p>	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
	minyak dan gas bumi nasional.	
	Pasal 103B	Pasal 103B
	<p>Pengecualian terhadap beberapa ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A hanya dapat diberikan apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tersedianya cadangan Minyak dan Gas Bumi yang cukup besar yang segera dapat dieksploitasi; b. diberlakukan pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina; dan c. adanya partisipasi modal nasional dalam perusahaan. 	Tetap
	Pasal 103C	Pasal 103C
	Menteri mengajukan permohonan pengecualian ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama untuk suatu Wilayah Kerja tertentu berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103B kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.	Tetap
	Pasal 103D	Pasal 103D

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
	Berdasarkan persetujuan Presiden, Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama dan menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.	Tetap
Pasal 104	Pasal 104	Pasal 104
<p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku :</p> <p>a. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil antara Pertamina dan pihak lain tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan.</p> <p>b. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beralih kepada Badan Pelaksana.</p> <p>c. Kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk <i>Joint Operating Agreement (JOA)/Joint Operating Body (JOB)</i> beralih kepada Badan Pelaksana dan berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan.</p> <p>d. Hak dan kewajiban (<i>participating interest</i>) dalam JOA dan JOB sebagaimana dimaksud dalam huruf c beralih dari Pertamina kepada PT Pertamina</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>(Persero).</p> <p>e. Kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk <i>Technical Assistance Contract</i> (TAC) dan Kontrak <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) beralih kepada PT Pertamina (Persero) dan berlaku sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan.</p> <p>f. Setelah JOA/JOB sebagaimana dimaksud dalam huruf c berakhir, Menteri menetapkan kebijakan mengenai bentuk dan ketentuan kerja sama dari wilayah bekas kontrak-kontrak tersebut.</p> <p>g. Setelah <i>Technical Assistance Contract</i> (TAC) dan Kontrak <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang berada pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina berakhir, wilayah bekas kontrak tersebut tetap merupakan bagian wilayah kerja PT Pertamina (Persero).</p> <p>h. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf e diperoleh kesepakatan para pihak, Menteri dapat menentukan kebijakan bentuk lain dari kontrak</p>		

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>yang bersangkutan.</p> <p>i. PT Pertamina (Persero) wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.</p> <p>j. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf i, wajib membentuk anak perusahaan dan mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk masing-masing Wilayah Kerja dengan jangka waktu Kontrak Kerja Sama selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>k. Besaran kewajiban pembayaran PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf i, dan huruf j kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.</p> <p>l. Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama bagi PT Pertamina</p>		

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>(Persero) dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, huruf i, dan huruf j.</p> <p>m. Pengalihan kontrak-kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak mengubah ketentuan-ketentuan kontrak.</p> <p>n. Badan Pelaksana dan PT Pertamina (Persero) menyelesaikan amandemen kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendapat persetujuan Menteri.</p> <p>o. Kontrak-kontrak penjualan dan transportasi LNG antara Pertamina dengan pihak lain beralih kepada PT Pertamina (Persero).</p>		
<p>BAB XIV PENUTUP</p>		
<p>Pasal 105</p>	<p>Pasal II</p>	<p>Pasal II</p>
<p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>	<p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2004</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2005</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2009</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2004</p> <p>SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. BAMBANG KESOWO</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2005</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. HAMID AWALUDIN</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2009</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. ANDI MATTALATTA</p>
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 123</p>	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 81</p>	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 128</p>